

Hanya Bangun Empat Toilet, Dinas Pariwisata Ende Habiskan Anggaran Rp2,2 Miliar Lebih



illustrasi: <https://endenews.com/>

ENDE, VICTORY NEWS-Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, NTT menghabiskan anggaran yang sangat fantastis, yakni Rp2,2 miliar lebih hanya untuk bangun 4 toilet.

Pembangunan 4 toilet tersebut untuk menunjang pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ende.

Berdasarkan data yang dihimpun victorynews.id dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ende, terbaca jelas dalam pengumuman pemenang tender pengerjaan empat toilet di Dinas Pariwisata Ende.

Dalam Pengumuman yang terbaca pada laman LPSE Kabupaten Ende tersebut, tertera bahwa pengerjaan 4 toilet pada Dinas Pariwisata Ende, masing-masing menghabiskan anggaran sebesar Rp500 juta lebih.

Pengerjaan 4 toilet tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata tahun 2021 sebesar Rp15 Miliar.

Dana tersebut dibagi dalam beberapa item pekerjaan penataan dan pembangunan destinasi wisata pada tiga lokasi di Kecamatan Ende Utara, Detusoko dan Kecamatan Kelimutu.

Dari alokasi dana DAK sebesar Rp15 Miliar juga diperuntukan untuk pembangunan 4 toilet yang tersebar pada empat lokasi berbeda, sebagai penunjang destinasi wisata.

Ada pun 4 lokasi pembangunan toilet tersebut di antaranya di kawasan Destinasi Wisata Pantai Ria, Taman Rendo, Air Panas Detusoko dan Sao Roa Wisata-Moni, kecamatan Kelimutu. 4 toilet yang dibangun harus dilengkapi dengan jaringan air, pompa dan jaringan listrik.

Ada 4 kontraktor yang mengerjakan toilet tersebut. Untuk lokasi Sao Ria Wisata Moni dikerjakan oleh CV Kelibhera, alamat Kabupaten Sikka dengan anggaran sebesar Rp568 juta lebih.

Sedangkan untuk lokasi wisata Air Panas Ae Oka Detusoko dikerjakan CV Tunbes alamat Kota Kupang. Pagu anggarannya sebesar Rp568.254.720. Nilai HPS sebesar Rp568.246.000.

Toilet di lokasi wisata Pantai Kota Raja, dikerjakan CV Kasih Ibu alamat Ende. Pagu anggarannya sebesar Rp568.254.720. Nilai HPS sebesar Rp568.253.200.

Sementara untuk lokasi Taman Rendo dikerjakan oleh CV Sarta Jaya Mandiri, beralamat di Jalan Perwira Ende. Pagu anggarannya sebesar Rp568.254.720, dengan nilai HPS sebesar Rp568.253.000.

Pantauan langsung victorynews.id, pembangunan toilet di dalam Taman Rendo, tidak terlihat adanya jaringan pipa untuk menyuplai air ke dalam toilet.

Sumber:

1. <https://www.victorynews.id>. Rabu, 15 Juni 2022: Hanya Bangun Empat Toilet, Dinas Pariwisata Ende Habiskan Anggaran Rp22 Miliar Lebih.
2. <https://endenews.com>. Rabu, 13 April 2022: Toilet Setengah Miliar Milik Pengkab Ende Isinya Bikin Warga Geleng-Geleng.

Catatan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pasal 73 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menjelaskan fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi:

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
2. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS menurut Pasal 1 angka 33 menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. HPS digunakan sebagai:
- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan setelah Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.